**Agama Akal Sehat, Upaya Menguliti Radikalisme**

**Marianus Mantovanny Tapung**

**Unika St. Paulus Ruteng Flores NTT**

***“Sebelum engkau beragama, jadilah manusia dahulu; sehingga suatu saat ketika agama membawamu pada kehancuran (kerusakan), engkau masih tetap ada sebagai manusia”* (Anonim).**

Isu radikalisme berekuivalensi dengan gagasan dan narasi toleransi. Secara geo-administrasi, paham radikalisme juga berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Alur berpikirnya, semakin kuat paham radikalisme dalam satu kota/negara maka semakin rendah pula indeks toleransinya. Begitu juga sebaliknya. Setara Institute dalam hasil surveinya di Desember 2018 menyebutkan Indeks Kota Toleran (IKT) di Indonesia (tirto.id, 14/12/2018). Menurut lembaga ini, 10 kota yang masuk dalam daftar papan bawah indeks kota toleransi secara berurutan, yaitu Sabang (3.757), Medan (3.710), Makassar (3.637), Bogor (3.533), Depok (3.490), Padang (3.450), Cilegon (3.420), Jakarta (2.880), Banda Aceh (2.830), dan Tanjung Balai (2.817). Sementara itu, 10 kota teratas IKT-nya berturut-turut, yakni Singkawang (6.513), Salatiga (6.477), Pematang Siantar (6.477), Manado (6.030), Ambon (5.960), Bekasi (5.890), Kupang (5.857), Tomohon (5.833), Binjai (5.830) dan Surabaya (5.823). Mirisnya, Jakarta sebagai Ibukota negara justru memiliki IKT yang rendah. Terlepas dari polemik terkait kesahihan risetnya, data ini bisa memberikan gambaran paham radikal bisa berkembang secara simultan dan resultan dari kota besar dan diikuti oleh kota-kota kecil. Simultansi dan resultansi gerakan secara geo-administratif seperti ini jelas sangat membahayakan, baik dari aspek terancamnya integrasi bangsa, juga aspek lain seperti keterhambatan dalam bidang pembangunan ekonomi, politik, investasi, kesejahteraan, pendidikan dan sosial budaya.

Fenomena kebangkitan gerakan-gerakan yang bersayap keagamaan memberi signal bahwa masyarakat masih memiliki orientasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agama yang dianutnya. Faktualitas ini perlu dihargai, ketika dibandingkan dengan masyarakat bangsa barat yang pada umumnya mengalami disorientasi dalam hidup berkeagamaan. Disorientasi tersebut bisa saja disebabkan kencangnya hembusan paham-paham seperti rasionalisme, sekularisme, liberalisme, pragmatisme, dll, yang memengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakatnya. Sementara dalam konteks kehidupan Indonesia yang plural/multikultural, entitas keagamaan telah memberi nilai lebih dalam mendukung kerukunan dan kedamaian hidup masyarakatnya (*peaceful co-existence*). Bahkan bila menoleh pada sejarah awal perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia, agama telah menjadi  basis spiritual-religius dan sosial yang begitu diperhitungkan ketika melawan segala bentuk imperialitas, dominasi dan determinasi  dari luar maupun dari dalam, yang mengancam integrasi bangsa. Agama sebagai lembaga spiritual-religius dan sosial telah membuktikan diri sebagai salah satu tameng dan pilar kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Institusi agama dan para ulamanya telah berperan sangat sentral dalam mengarahkan dan memberdayakan umatnya untuk senantiasa memelihara kerukunan dan kedamaian negara bangsa. Karenanya, agama-agama harus tetap bertahan dan perlu mengembangkan diri agar selalu dapat mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun, dalam perkembangan dekade terakhir, gerakan-gerakan yang bersayap keagamaan dan cenderung radikal, merebak dan menjamur. Gerakan-gerakan ini bukan saja berkutat hanya dalam tataran konseptual-ideologis, tetapi juga sudah masuk pada level praksis. Radikalisme dan bahkan terorisme bukan lagi bayang-bayang jauh yang mustahil menjadi nyata di negara kita, atau hanya sekedar mimpi-mimpi buruk waktu tidur. Saat ini radikalisme dan terorisme sudah menjadi hantu yang sangat nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang sejak dulu dikenal dengan keindahan pluralisme dan toleransinya. Dan tak dapat dipungkiri lagi, pluralisme dan toleransi yang selama ini menjadi ikon dalam gapura kebangsaan Indonesia, mulai perlahan terkoyak dan pada saatnya nanti akan mengalami kejatuhan. Harga mahal pluralisme dan toleransi yang sudah dipelihara dalamm rentang sejarah peradaban Indonesia, bisa-bisa akan runtuh oleh peran sesaat dari gerakan-gerakan radikalis dan teroris.

Radikalisme, selain menjadi kecenderungan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga lebih dari itu, sangat mengangkangi berikut menafikan martabat manusia. Dua dekade terakhir, sudah tercatat begitu banyak kejadian yang mengorbankan nyawa manusia, karena akibat berbagai gerakan radikalisme ini. Di indonesia, radikalisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, sudah menjadi gerakan yang sistematis dan terstruktur. Masifikasi gerakan ini bahkan sudah merambah dari segmen masyarakat kecil yang tak terpelajar sampai pada juga masuk pada dunia terpelajar seperti sekolah dan kampus. Kadar bahaya dari gerakan radikal, selain terletak pada proses rektrutasi yang senyap, terstruktur dan sistematis, tetapi juga brutalitas dalam menjalankan gerakan, yang dapat dengan mudah dan cuma-cuma menghilangkan jiwanya sendiri dan jiwa banyak manusia lain yang tidak berdosa. Justru yang mengagetkan, kebangkitan gerakan-gerakan radikal ini bertautan dengan aktivitas dan tujuan keagamaan. Dan ketika dikaitkan dengan aktivitas keagamaan tertentu, tertanam dan sangat mengakar (*well founded*) keyakinan bahwa berbagai tindakan brutal tersebut bertujuan memuliakan Allah dan mengagungkan agama. Hal ini sudah pasti menciptakan realitas kontradiktoris. Satu pihak, agama mesti hadir untuk membawa kedamaian sebagaimana yang menjadi tujuan keberadaan di muka bumi ini, tetapi pada sisi lain, sumber-sumber kerusakan dan kekacauan justru muncul dari agama. Allah dan agama dieksploitasi untuk menebar kebencian, teror, pembunuhan, kerusakan dan kekacauan. Meskipun harus disadari, kerusakan dan kekacauan tersebut merupakan akibat yang tak bisa dihindari ketika agama dimanfaatkan dan dijadikan sebagai komoditas gerakan politik dan sosial yang menyimpang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bertumbuh dan berkembangnya berbagai gerakan radikal ini, memberi peringatan kepada negara untuk segera melakukan langkah-langkah strategis ‘penyelamatan’ sekaligus tindakan-tindakan tegas untuk memberangus kehadiran berbagai bentuk organisasi yang dinilai mengancam pluralitas dan multikuluralitas. Radikalisme tentunya tidak bisa terlepas dari semakin menggemanya isu transnasionalisme. Transnasionalisme merupakan gerakan sistematis yang berupaya mereduksi dan menyeragamkan masyarakat dari berbagai bangsa menjadi satu bangsa dunia dengan satu ideologi politik tertentu, sudah pasti akan menjadi ancaman nyata bagi ideologi keberagaman dan multikultural, persis seperti yang melekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Radikalisme, fundamentalisme dan transnasionalisme sudah pasti menjadi ancaman nyata, serius dan krusial, yang pada tingkat paling kronis akan memporakporandakan demokrasi Pancasila. Gerakan-gerakan dengan berpola destruksi yang sangat masif dan sistematis, selain berideologi ekstrim, intoleran dan tidak manusiawi, juga memiliki militansisme dan heroisme yang kuat dari para penggagas, berikut pengikutnya.

Radikalisme tidak muncul begitu saja. Dalam peta perkembangan pengetahuan, radikalisme dalam segala bentuk dan manifestasinya merupakan penampakan lain dari irasionalitas. Ada beberapa ciri dari radikalisme yang menggambarkan tentang kecenderungan irasional tersebut, antara lain: (1) Paranoid dengan dialektika pemikiran kritis. Radikalisme ditumbuhkembangkan oleh kaum radikalis yang sangat eksklusif dalam pemikiran dan tindakannya. Mereka tidak terbuka pada kritik dan mengkultuskan pemikirannya sendiri dan pribadi-pribadi yang menjadi rujukan utamanya. Dominasi permainan emosi merupakan hasil dari proses ‘cuci otak’ (brain washing) yang efektif. (2) Sangat defensif dan ofensif untuk menyatakan klaim kebenaran dan menganggap pihak lain tidak memiliki akses dan kompetensi kebenaran. Mereka berasumsi, di luar kelompoknya dan keyakinannya tidak ada kebenaran. (3) Dalam upaya menemukan kebenaran rasional, kaum radikalis menggunakan metode dan pendekatan yang tidak lazim dan tidak sahih secara saintifik. Meskipun demikian, kaum radikalis ini sangat menyakini bahwa metode dan pendekatan yang mereka gunakan sangat benar dalam meraih kebenaran. Dengan demikian mereka menyakini kebenaran yang muncul kemudian (*post truth*), yang menegasikan dengan gampang kebenaran lama, yang merupakan hasil temuan dari metode dan pendekatan yang sahih secara saintifik. Kaum radikalis menafikan hal-hal yang bersifat empirik dan evidensial dan menyakini ada peran ‘yang tak terlihat’ yang akan membuktikan kebenarannya. (4) Secara sosial, kaum radikalisme cenderung mengisolasi diri dan memiliki relasi ekslusif-elitis. Mereka selalu berada dalam ‘ketakutan’ bergaul dengan orang lain karena menganggap orang lain akan membawa pencemaran dan penistaan terhadap diri dan lingkungannya. Orang lain, di luar dirinya adalah sumber petaka bagi dirinya, karena itu pada titik yang paling ekstrim, ada upaya untuk menghilangkan atau menyingkirkan eksistensi dari orang lain tersebut, dengan cara-cara yang ekstrim sekalipun.

Dengan demikian, musuh dari radikalisme adalah rasionalitas. Sebab bila merujuk pada ciri khas dari konsep dan praksisnya, radikalisme sangat berseberangan dengan rasionalitas. Rasionalitas merupakan suatu sikap kesediaan untuk mendengarkan argumen-argumen kritis dan belajar dari pengalaman. Dalam bukunya yang berjudul *The Open Society and its Enemies*, 1999:526-529), Popper menyebutkan rasionalitas secara fundamental merupakan sikap yang mengakui bahwa ‘saya mungkin salah dan anda mungkin benar, dan dengan suatu ikhtiar, kita mungkin mendekati kebenaran’. Rasionalitas merupakan suatu bentuk perilaku yang tidak membuang harapan bahwa lewat argumentasi dan observasi yang cermat, orang bisa mencapai suatu kesepakatan pada masalah-masalah penting; dan bahwa, bahkan ketika kepentingan dan tuntutan mereka berbenturan, sering dimungkinkan untuk berdebat tentang berbagai tuntutan dan proposal, dan untuk mencapai – mungkin melalui arbitrasi- suatu kompromi yang karena keadilannya, dapat diterima sebagian besar orang, jika tidak seluruh orang. Pendeknya, sikap seorang rasional, yaitu ‘sikap kemasuk-akalan’ (*attitude of reasonableness*), mirip dengan sikap ilmiah, mirip dengan kepercayaan bahwa untuk mencari kebenaran, kita perlu bekerja sama, dan bahwa dengan bantuan argumen yang masuk akal, pada akhirnya kita bisa bekerja sama. Jika dipandang positif, rasionalitas lebih mempertimbangakan argumen-argumen yang sifatnya interaktif-dialogis daripada argumentasi itu sendiri. Dialetika argumentasi jauh lebih bermakna dari pada isi argumentasi itu sendiri. Fakta ini mengarah pada pandangan bahwa kita harus mengakui setiap orang yang berkomunikasi dengan kita sebagai sumber argumentasi yang potensial dan menjadi informasi yang masuk akal. Pertemuan argumen-argumen akan menjadi ‘persatuan rasional umat manusia’. Hal ini sangat mempertegas apa yang diungkapkan oleh Hegel (1770-1831) bahwa sebenarnya akal sehat adalah suatu produk sosial dan merupakan suatu jenis bagian tak terpisahkan dari jiwa atau roh masyarakat. Bahkan bila berpengaruh baik, akan ini menjadi penentu dalam perubahan peradaban dalam masyarakat. Dengan demikian, masayarakat adalah segala-galanya dan individu tidak berarti apa-apa. Atau bahwa nilai yang dimiliki oleh individu merupakan hasil dari bentuk kolektivitas dalam masyakat, yang menjadi pemilik dari semua nilai.

Dalam hubungannya dengan manusia lain di muka bumi ini, manusia dilahirkan sebagai yang berakal budi (*animal rationale*). Sebagai penegasannya, Plato (427-347 SM) mengidentikan akal sehat sebagai pengetahuan. Untuk mencapai pengetahuan sejati, manusia perlu mengandalkan akal budinya, yang sebut sebagai Ide Abadi. Sementara Descates (1596-1650) mengatakan bahwa untuk dapat mencapai pengetahuan yang benar dan sejati tentang realitas, manusia harus mengandalkan akal budinya. Dan kegiatan untuk menangkap realitas dengan mengandalkan akal budi ini, disebut proses berpikir. Menurut Descartes, ketika manusia berpikir, maka manusia itu ada. ”Saya berpikir, maka saya ada” (*cogito ergo sum*). Kegiatan berpikir untuk menegaskan keberadaan manusia sebagai kebenaran yang pasti dan tak terbantahkan, yang menjadi landasan bagi pemikiran dan pengetahuan manusia. Karena itu, kegiatan berpikir dengan mengandalkan akal budi adalah unsur yang paling kokoh dan pokok dari pengetahuan manusia. Segala sesuatu yang dapat diterima akal budi dalam proses berpikir menjadi pengetahuan yang benar dan sejati.

Dengan demikian, radikalisme dan rasionalitas tidak pernah bisa didamaikan, karena argumen termasuk kritik, dan seni mengeritik adalah dasar dari kemasukakalan. Akal, seperti halnya ilmu pengetahuan, berkembang melalui kritik mutual; satu-satunya jalan yang mungkin dalam ‘merancang’ pertumbuhan akal adalah dengan mengembangkan institusi-institusi yang melindungi kebebasan kritik, yaitu, kemerdekaan berpikir. Rasionalitas sejati seperti yang dikonsepkan oleh Sokrates (469 SM - 399 SM), yaitu rasionalitas kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan sesesorang, kerendahan hati intelektual dari orang yang mengetahui betapa seringnya mereka khilaf, dan betapa mereka banyak bergantung pada orang-orang lain demi pengetahuan ini. Rasionalitas adalah kesadaran bahwa kita tidak boleh berharap terlalu banyak pada akal kita sendiri, tetapi dengan berinteraksi dengan orang lain, akal kita semakin lebih jelas. Sementara itu, radikalisme terjebak dalam cara berpikir dan berperilaku irasional, di mana mereka tidak bisa beragumentasi dan mayoritas mereka dikuasai oleh emosi-emosi dan nafsu-nafsu ketimbang berdasarkan akal. Kaum rasional mengharuskan semua argumen dimulai dari asumsi-asumsi, namun kaum radikal menuntut bahwa semua asumsi harus didasarkan pada argumentasi adalah hal yang jelas mustahil. Karena itu, mereka tidak pernah menjadi manusia akal (*men of reason*). Kaum radikal-irasional hidup dari insting-insting dan impuls-impuls yang bisa mematikan kreativitas dan respon yang positif terhadap perubahan dan perkembangan.

Sikap rasional dicirikan oleh kedekatan sikap tersebut dengan argumen dan pengalaman, meskipun argumentasi yang logis atau pengalaman yang baik tidak serta merta menjadi rasionalisme. Semua orang mungkin membuat kesalahan. Kesalahan tersebut mungkin ditemukan oleh diri sendiri, atau orang lain, atau oleh dirinya sendiri dengan bantuan kritik orang lain. Oleh karena itu, sikap ini menyarankan ide bahwa tak seorang pun seharusnya menjadi hakim bagi dirinya sendiri, dan menyarankan ide ketakberpihakannya (imparsialitas). Hal ini terkait dengan obyektivitas saintifik. Kepercayaan pada akal bukan hanya kepercayaan pada akal kita sendiri tetapi juga yang lebih penting percaya juga pada akal orang lain. Sehingga seorang rasional, sekalipun ia menyakini dirinya sendiri secara intelektual lebih superior dari orang lain, akan menolak semua bentuk klaim otoritas, karena ia sadar bahwa, jika kepandaiannya lebih superior daripada kepandaian orang lain, superioritas ini hanya berarti sejauh ia mampu belajar dari kritik dan kesalahan, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang dilakukan orang lain, dan bahwa orang dapat belajar dalam pengertian ini hanya jika orang tersebut memahami orang lain dan gagasan mereka yang serius. Oleh karena itu, rasionalisme terkait dengan ide bahwa orang lain punya hak untuk didengar, dan untuk mempertahankan argumennya. Dengan demikian, rasionalisme menunjukkan pengakuan atas klaim toleransi, setidaknya pengakuan atas orang-orang yang bersikap toleran. Orang tidak akan membunuh orang lain jika ia mengadopsi sikap untuk terlebih dahulu mendengarkan (*golden rule*).

Dalam konteks ini, gagasan imparsialitas dalam menemukan kebenaran juga mengarah pada ide tanggung jawab (Popper, 1999:527). Dalam hal ini, kaum rasionalis tidak hanya harus mendengarkan argumentasi orang lain, tetapi juga berkewajiban untuk merespons, menjawab manakala tindakan-tindakannya memengaruhi orang lain. Dalam hal ini, rasionalitas akhirnya dihubungkan dengan pengakuan tentang perlunya institusi-institusi sosial untuk melindungi kemerdekaan kritik, kebebasan berpikir, dan kemerdekaan manusia. Dan rasionalitas menetapkan semacam kewajiban moral untuk mendukung institusi-institusi tersebut. Hal ini menjadi alasan mengapa rasionalitas sangat erat dihubungkan dengan tuntutan politik bagi rekayasa sosial yang beadab, humanitarian, dan terbentuknya masyarakat komunikatif, memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang bertanggung jawab di bawah kontrol sepenuhnya oleh akal.

Menurut Rubenstein (1987:xvii) dalam artikelnya: *A primary Internal Cause of Terrorism, Dictating to A Degree Its Philosophy, Tactics and Consequences*, penyebab utama dari adanya terorisme (radikalisme) adalah ‘pengetahuan marjinal’ (*Disaffected intelligentia*) atau kondisi minimnya pengetahuan dari seseorang atau sekelompok masyarakat. Nah, ketika suatu bangsa mengalami konflik sosial, politik, ekonomi, atau yang berbau SARA, maka mereka yang memiliki ‘pengetahuan marginal’ ini menjadi sangat potensial untuk dieksploitasi elit intelektual politik, ekonomi atau agama. Mereka diperdaya untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim, anarkis, bahkan susaidal demi kepentingan terselubung dari elit intaelektual politik, ekonomi atau agama tersebut. Tidak cukupnya pengetahuan menyebabkan kaum ini ‘gagal paham’ dan ‘gagal mengerti’ terhadap bentuk provokasi, agitasi dan indoktrinasi yang sesat. Berikutnya, kaum elit intelektual tadi, secara masif, terstruktur dan sistematis menanamkan sentimen-sentimen yang berbau suku, ras, agama dan bangsa demi membangkitkan militansi ‘berani mati’ dari kaum ini.

Istilah ‘pengetahuan marjinal’ dari Rubenstein sangat identik dengan istilah ‘irasionalitas’ Jurgen Habermas (2002:19) dalam bukunya *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*. Menurutnya, irasionalitas adalah suatu kondisi dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki cukup informasi dan pengetahuan tentang perkembangan yang sedang terjadi di dunia. Hal ini membuat mereka menganggap apa yang sudah dijalankan selama ini sudah benar, tetapi pada pihak lain, mereka dengan mudah menjadi korban dari informasi dan perkembangan yang ada. Mereka mudah distir dan digiring oleh kaum berpengetahuan untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Jadi, radikalisme dan terorisme merupakan bentuk-bentuk irasionalitas, yang sering dimanfaatkan oleh kekuatan intelektual elit-elit tertentu.

Agama menjadi institusi yang sangat penting dan mendasar bagi garansi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini bisa ditelisik dan dikaji dalam kerangka keterkaitan agama dengan perkembangan rasionalitas (pengetahuan). Dalam perspektif hubungan dengan rasionalitas (pengetahuan), agama justru semakin mendapat tempatnya. Dalam sejarah pertumbuhan agama-agama besar, factor keterkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi sangat menentukan keberadaan dan keberlangsungannya di muka bumi ini. Saya ambil contoh kasus sejarah pertumbuhan Gereja Katolik. Munculnya Revolusi Pengetahuan Kopernikus (1473-1543) dengan gerbong heliosentrismenya telah mengoreksi secara mendasar paham geosentrisme yang dikembangkan berabad-abad lamanya oleh otoritas Gereja. Koreksi yang besar ini membidani lahirnya berbagai dampak reformasi dan transformasi pemikiran, di mana gereja mulai terbuka pada diskursus, penalaran bebas dan cara pandang alternatif serta merespon secara positif perkembangan ilmu dan teknologi. Pengakuan mengenai ‘adanya keselamatan di luar gereja’ dan ‘gereja harus senantiasa merubah dirinya’ serta ‘gereja menjaga keseimbangan antara iman dan pengetahuan’, menjadi tiga hal mendasar yang menandai perubahan dan keterbukaan dalam tubuh Gereja.

Momentum perubahan dan keterbukaan ini dilanjutkan spiritnya dalam konsili Vatikan II (1962-1965), di mana dalam beberapa segmennya telah membuat evaluasi terhadap isi dogma dan tradisi gereja yang dinilai tidak relevan, aktual dan kontekstual lagi. Evaluasi ini tentunya merujuk pada elaborasi konstruktif  antara ilmu pengetahuan, filsafat dan teologi yang pada saat itu sudah berkembang pesat. Gagasan dan bahasan yang substantif, relevan, aktual dan kontekstual pada berbagai ensikliknya dalam konsili itu, memberi gambaran terang bahwa Gereja sudah semakin responsif dan akomodatif pada kebaruan dan kekinian, baik dalam cara pandang, sikap hidup, dan maupun cara menanggapi perubahan dan perkembangan. Karenanya, mengemukanya gagasan tentang keseimbangan pengembangan iman dan pengetahuan menjadi alasan yang paling masuk akal tentang mengapa Gereja tetap ‘berada’ dan ‘mengada’ secara baik sampai saat ini. Gagasan inilah yang kemudian membuat Gereja bertumbuh dan berkembang, diterima dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia. Menyadari hal ini, tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II meminta maaf kepada dunia karena telah lama resisten terhadap perkembangan pengetahuan dan terlibat dalam konspirasi ‘membunuh’ Galileo Galilei (1564-1633); seorang  ‘santo’ dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, kesadaran ini diafirmasi kembali dalam pidato Paus Benediktus XVI, 21 Desember 2008  mengenai rehabilitasi nama Galileo Galilei sebagai ilmuwan dunia. Masyarakat dunia pada umumnya merespek dan mengapresiasi secara baik permintaan maaf dari dua pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma ini.

Selanjutnya, pandangan dan sikap gereja terhadap perkembangan dan masalah dunia berikut berbagai penyelesaian, tidak pernah terlepas dari kajian-kajian kritis-analitis dan solutif,  yang merupakan kompetensi inti dari ilmu pengetahuan.  Adanya ruang untuk mengaktualisasikan dan mengkontestualisasikan ajaran-ajaran social gereja  dengan realitas hidup masyarakat, serta kesempatan untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan ajaran-ajaran tersebut dengan keseharian hidup masyarakat, menyebabkan gereja semakin mendapat tempatnya di dunia. Dampak lain dari keterbukaan ini, muncul para pemikir (teolog, filosof, ilmuwan) yang  dengan kritis-konstruktif memberi masukan kepada Gereja ketika menyikapi berbagai perkembangan dan perubahan di masyarakat. Bertolak dari masukan tersebut, Gereja selalu dapat merubah dirinya sesuai dengan tuntutan perubahan zaman, serta tetap menjadi lembaga yang memiliki komitmen dan konsistensi dalam mengadvokasi, mengakomodasi dan menfasilitasi kebutuhan dan harapan umat ketika berrelasinya dengan Tuhan dan sesama. Gereja jadinya harus selalu eksis sebagai tanda kehadiran Allah di tengah dunia dan senantiasa membawa keselamatan dan  perdamaian di muka bumi.

           Einstein ([1879](https://id.wikipedia.org/wiki/1879)-[1955](https://id.wikipedia.org/wiki/1955)) menegaskan ‘ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta’ dan ‘agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh’. Penegasannya, agama yang tidak berbasiskan pengetahuan akan cenderung mengalami ‘kebutaan’ dan rentan terjebak dalam alur spiritualisme, mitisisme, fasisme, radikalisme, ekslusivisme dan fundamentalisme. Ekstrim-ekstrim ini kerap kali menjajah rasionalitas dan intelektualitas sehingga dengan mudah menggiring umatnya pada praktik-praktik keagamaan yang tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Karena tidak adanya saringan kritis, umat mudah digiring pada penghayatan yang ekstrim, kaku, tidak manusiawi, intoleran, berprasangka, berujar dan bertindak kebencian. Sebaliknya juga, bila iman disubordinasi oleh intelektualitas, maka ada kecenderungan glorifikasi berlebihan kepada pengetahuan (intelektualisme). Intelektualisme akan menjadikan masyarakat terkurung pada penghayatan dan penyelesaian masalah hidup secara positivistik dan rasionalistik semata, dan pada akhirnya membentuk sikap absurd, gamang, agnotis,  indiferen dan ateis. Sementara ada banyak hal di muka bumi ini yang tidak dapat diselesaikan dengan pengetahuan manusia semata, kecuali mengandalkan keyakinan pada sang Pemberi kehidupan. Ada banyak peristiwa miris kerusakan dan degradasi manusia di dunia ini, justru karena kaum intelektual terlalu memaksa diri untuk menyelesaikan proyek-proyek duniawinya hanya dengan bertumpu pada pengetahuan dan lupa akan keterbatasannya.

Sintesis yang dialogis antara agama dan pengetahuan akan melahirkan kecerdasan intelektual dan spiritual yang dapat membantu manusia agar bijak dalam menyikapi fenomena hidup kesehariannya. Agama menjadi penting dalam diri seorang intelektual demi membantu membangun kesadaran reflektif tentang keunggulan dan keterbatasan. Seorang intelektual perlu menyadari keunggulan agar semakin percaya diri dalam mengembangkan intelektualitasnya bagi kepentingan sesama dan keberlangsungan alam dunia. Namun, ia juga harus menyadari keterbatasannya, rendah hati dan bersyukur atas karunia intelektualitasnya itu sehingga ia semakin dicintai oleh Tuhan pemberi kemampuan tersebut.

Sementara itu, pengetahuan memberi landasan rasional terhadap penghayatan dan gerakan iman dalam agama. Pengetahuan membantu penganut agama untuk menjalankan iman secara kritis, dialogis dan inklusif  dalam membangun hubungannya dengan sesama dan Tuhan, agar terhindar dari kesesatan berpikir dan godaan kepentingan-kepentingan sesaat. Jika rasionalitas dan kritisitas diremehkan oleh institusi agama dan penganutnya, maka akan berujung pada dua sisi negatif. Sisi negatif pertama, bisa saja institusi agama dan penganutnya menjadi sangat fasis, eksklusif, sektarian, radikal dan fundamental, yang bisa meresahkan dan menganggu kenyamanan toleransi hidup beragama dan integrasi bangsa. Atau pada sisi negatif lainnya, bisa juga agama dan penganutnya menjadi sangat sekular, pragmatis, instan dan  artifisial semata, yang kemudian dengan mudah terjerembab  dalam konflik kepentingan, baik ekonomi, politik maupun ideologi sekular-pragmatis tertentu. Kita tidak mengharapkan dua sisi negatif membiak dan menjadi jamak, kemudian bisa mengancam kerukunan hidup beragama dan kesatuan bangsa yang sudah dipelihara dengan susah payah selama ini.

Upaya menumbuhkan sikap kritis-dialogis dalam kehidupan beragama menjadi tanggung jawab semua pihak. Menumbuhkan sikap kritis dan dialogis ini bisa dilakukan melalui kegiatan edukasi, advokasi, pencerahan dan diskursus, demi penguatan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial. Ketika mampu berpikir, bersikap dan bertindak kritis sosial, warga masyarakat bisa merasionalisasi berbagai isu, gerakan, agitasi, provokasi dan indoktrinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan itu, masyarakat tidak mudah terpengaruh dan tergiring untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif. Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan dialogis ini secara strategis dapat diintegrasikan dalam pendidikan seperti kegiatan-kegiatan formal di sekolah-sekolah, informal di masyarakat (agama dan keluarga) dan non formal di tempat-tempat pelatihan/kursus. Pendidikan berbasis pengembangan berpikir kritis-dialogis ini akan meningkatkan *hard skills* warga masyarakat untuk mampu menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, membuat keputusan dan menemukan solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk persoalan terorisme. Selain itu, dapat juga meningkatkan *soft skills* dalam hal kerukunan, kesantunan, keterbukaan, saling menghargai, toleransi, bekerjasama, dll. Bertrand Russel dalam artikelnya *Education for Democracy* (1939:530) mengafirmasi, bangsa yang kuat tatanan sosialnya tidak terlepas dari upaya pendidikan dalam membangun karakter kritis-dialogis dalam diri warganya. Masyarakat yang rasional dan kritis memiliki dasar yang kuat dalam membangun tatanan sosial termasuk mencegah dan melawan berbagai bentuk terorisme dan radikalisme.

**Bahan Bacaan**

Daniel. L.Pals, 1996. *Tujuh Teori Tentang Agama; Dari Animisme E.B. Tylor, Materialisme Karl Marx, hingga Antropologi Budaya C. Geertz* (terj. Ali Noer Zaman), Yogyakarta: Qalam,

Daniel. L Pals, 2005. *Dekonstruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama* (terj. Inyiak Ridwan Muzir, dkk), Yogyakarta: IRCiSoD,

Duriana, 2017. *Ideologi Radikalisme Agama Pasca Konflik* LP2M AIN Ambon.

Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Franz Magnis Suseno,1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis,* Jakarta:Kanisius.

Franz Magnis Suseno, 2003. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Paulo Freire, 2004. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan* (diindonesiakan oleh Agung Prihantono & Fuad Fudiyarto), Yogyakarta: Pustaka Jaya.

Fromm, Erich, 1995. *Masyarakat yang Sehat,* (terj. Thomas Bambang Murtianto). Jakarta: Obor.

Galeotti, Anna Elisabetta, (2012), “Mempertimbangkan Kembali Toleransi”, dalam Felix Baghi (ed.), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi,* Maumere: Penerbit Ledalero.

Halili & Bonar Naipospos, 2014. *Stagnasi Kebebasan Beragama, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013,* Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Jurgen Habermas, 1972. *Knowledge and Interests,*  Boston: Beacon Press,

Jurgen Habermas, 2002. *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, ed. Eduardo Mendieta, MIT Press.

Karl R. Popper, 2008. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya* (terj. Uzair Fauzan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kinch, J.W., 1974. *Social Problems in the World Todays*. London:Addison-Wesley Publising Company.

Lavine, T.Z., 2002. *Petualang Filsafat: Dari Socrates ke Satre,* (Dindonesikan oleh Andi Iswanto dan Deddy Adrian Utama), Jendela: Yogyakarta.

Marianus Mantovanny Tapung, 2006. ”Dialektika Manusia Menurut Hegel dan Marx dan Implikasinya Bagi Dunia Pendidikan; Sebuah Telaah Filosofis”, *Jurnal* *Missio,* Vol. 3, No. I, Januari-Juli.

Marianus Mantovanny Tapung, 2006. “Filsafat Pendidikan Konstruktivisme dan Upaya Pencerdasan Peserta Didik”, *Jurnal* *Missio,* Vol. 2, No. I, September-Desember.

Persell, C. H., *Understanding Society; An Introduction To Sociology* (Third Edition), New York:Harper & Row Publisher, 1992.

Ricceour, Paul (2012), “Erosi Toleransi dan Melawan Apa yang Tidak Dapat Ditolerir”, dalam Felix Baghi (ed.), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi,* Maumere: Penerbit Ledalero.

Russel, Bertrand, 2007. *The Problem of Fhilosophy*, (terjem.) *.* Colombus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Rubenstein, 1987; “A primary Internal Cause of Terrorism, Dictating to A Degree Its Philosophy, Tactics and Consequences”. Policy Press.